

EDUKASIA

JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN ISLAM

Pendidikan Politik di Pesantren (Sebuah Pendekatan Fiqih Siyasa dalam Memahami Peran Pesantren di Panggung Politik)

Abdurrahman Kasdi

Pendidikan Seks Komprehensif (Solusi Atas Pergaulan Bebas Remaja Masa Kini)

Anisa Listiana

The Trend of Grammatical Error In Writing at MAN Limboto Kab. Gorontalo Academic Year 2008/2009

Isti Tahir

Tantangan Pendidikan Islam dalam Kontaksi Masyarakat Global

Muhamad Nurudin

Menumbuhkan Kesadaran Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Bagi Guru PAI

Retno Susilowati

Penelitian Tindakan Kelas untuk Meningkatkan Pembelajaran

Kisbiyanto



**Jurusan Tarbiyah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus**

EDUKASIA

JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN ISLAM

Jurusan Tarbiyah STAIN Kudus
Vol. 7. No. 2 Juli - Desember 2010

Pelindung
Ketua STAIN Kudus

Penanggung Jawab
Thoifuri

Redaksi
Kisbiyanto
Masrukhin
Ahmad Falah
Ida Vera Sophya

Penyunting/ Mitra Bestari
Fatah Syukur
A.H. Kahar Utsman
Mukhammad Saekan
Agus Retnanto

Desainer Grafis
Ahmad Hamdani
Rini Dwi Susanti
Taranindya Zulhi Amalia
Fatma Laili Khoirun Nida

Tata Usaha
Muflihah
Abdul Charis
Umroh
Moh. Tamrin
Mansur Hidayat
Istikomatul Khasanah
Mustafa'ah

Alamat Redaksi

Jurusan Tarbiyah STAIN Kudus Jl. Conge Ngembalrejo PO. Box 51
Telp. (0291) 432677, Fax. (0291) 441613 KUDUS 59322

Jurnal **EDUKASIA** diterbitkan oleh Jurusan Tarbiyah STAIN Kudus setiap enam bulan sekali dan menerima karya tulis sesuai dengan maksud jurnal tersebut di atas. Naskah yang dikirim agar diketik rapi antara 15-25 halaman dengan spasi 1,5 beserta biodata penulis dan mencantumkan daftar pustaka sebagai sumber referensi. Redaksi berhak memperbaiki susunan kalimat tanpa merubah isi tulisan yang dimuat.

PENGANTAR REDAKSI

Syukur al-hamdulillah Jurnal Pendidikan Islam "EDUKASIA" Volume 7 No. 2 Juli-Desember 2010 terbit kembali.

Jurnal "EDUKASIA" mencoba menampilkan kajian-kajian yang berkaitan dengan persoalan-persoalan pendidikan terutama pendidikan Islam dari ditinjau dari berbagai aspek.

Hasil-hasil kajian yang ditawarkan oleh para penulis dalam jurnal ini semoga bisa menambah wawasan bagi para pembaca. Kami hadir dalam ragam yang konsisten dan selalu mencoba menjadi lebih baik. Segala kritik dan saran selalu akan kami terima untuk perbaikan dalam edisi berikutnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ز	z	ف	f
ب	b	س	s	ق	q
ت	t	ش	sh	ك	k
ث	th	ص	s	ل	l
ج	j	ض	d	م	m
ح	ḥ	ط	ṭ	ن	n
خ	kh	ظ	ẓ	و	w
د	d	ع	'	ه	h
ذ	dh	غ	gh	ي	y
ر	r				

Bunyi *madd* : ā (آ)
 ī (إي)
 ū (أ)

Bunyi *diftong* : ay (أي)
 aw (أو)

EDUKASIA
JURNAL PENELITIAN
PENDIDIKAN ISLAM

DAFTAR ISI
Juli - Desember 2010
Volume 7, Nomor 2

ii	Susunan Redaksi
iii	Pengantar Redaksi
v	Transliterasi
vii	Daftar Isi
1	Pendidikan Politik di Pesantren (Sebuah Pendekatan Fiqih Siyasah dalam Memahami Peran Pesantren di Panggung Politik) <i>(Abdurrahman Kasdi)</i>
16	Pendidikan Seks Komprehensif (Solusi Atas Pergaulan Bebas Remaja Masa Kini) <i>(Anisa Listiana)</i>
42	Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia Versi Muhamadiyah <i>(Dzikri Nirwana)</i>
65	The Trend of Grammatical Error in Writing At MAN Limboto Kab. Gorontalo Academic Year 2008/2009 <i>(Isti Tahir)</i>
91	Tantangan Pendidikan Islam dalam Kontalasi Masyarakat Global <i>(Muhamad Nurudin)</i>

-
- 111 Menumbuhkan Kesadaran Pembelajaran Berbasis
Teknologi Informasi bagi Guru PAI
(*Retno Susilowati*)
- 122 Critical Review of Language Learning
(*Ida Vera Sophya*)
- 132 Peningkatan Kemampuan Menulis dalam Mata
Pelajaran Bahasa Inggris melalui Teknik Analisis
Kesalahan Berbahasa Secara Terpadu pada Siswa
- Siswi Kelas VIII MTs PIA Tayu TP. 2009/2010
(*Aliyatin Nafisah*)
- 160 Pembinaan Sikap dan Kesadaran Beragama Sejak
Usia Dini
(*Mubasyaroh*)
- 176 Penelitian Tindakan Kelas untuk Meningkatkan
Pembelajaran
(*Kisbiyanto*)

MODERNISASI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA VERSI MUHAMMADIYAH

Dzikri Nirwana

Abstrak: As one of the modernization of the Islamic movement in Indonesia, Muhammadiyah was born as a manifestation of a profound struggle of thought, he was not just a movement of thought per se, but a real charity in society. In the history and development of its action in Indonesia, Muhammadiyah, both as ideas and organizations, has shown his true identity to run in color vision and mission aspects of life with the modernization of Indonesian Muslims, although the target achieved modernization, especially the education aspect, it seems necessary to further optimized again. However, Muhammadiyah has a positive attitude towards the changes that are nearby, as reflected in the steps that are always being adaptive and accommodative to the existing problems, both political sector, economic, social, and education. In this context, the Muhammadiyah continue to spur the flow system in accordance with the growing age, seen from the development organization, both internal Muhammadiyah itself, like many organizations built Muhammadiyah, as well as from external organizations, such as the number of educational institutions, from pre-school to college who use teaching system Muhammadiyah.

Keywords: Muhammadiyah, the modernization of education, educational dualism

42

A. Pendahuluan

'Modernisasi Islam' merupakan suatu istilah yang dipergunakan untuk semua gerakan yang bertujuan memperbaharui cara berpikir dan cara hidup umat Islam yang muncul sebagai respon dari perkembangan zaman.

Dalam catatan Stoddard, Ibn Taymiyah (w. 1328 M.) yang didakwakan sebagai 'Bapak Pembaharu Islam', menyebut gerakan tersebut dengan muhy atsar al-salaf, yakni membangkitkan kembali ajaran-ajaran lama, yang dimaksudkannya adalah para sahabat nabi

dan *tābi'in*; senantiasa mempraktekkan *ijtihād* dan anti kemusyrikan serta *bid'ah*, pedoman satu-satunya adalah al-Qur'an dan al-Sunnah. Gerakan pembaharuan Islam ini, dari Ibn Taymiyah, lalu dilanjutkan oleh generasi sesudahnya, seperti Ibn Qayyim al-Jawziyyah (w. 1350 M.), Muhammad ibn 'Abd al-Wahhāb (w. 1787 M.), Jamāl al-Dīn al-Afghani (w. 1897 M.), serta sejumlah tokoh mujaddid lainnya yang intinya menitikberatkan pada reform ajaran agama murni (salaf) dan mengharmoniskannya dengan kehidupan kemasyarakatan dan politik.

Arussalaf yang disebut tadi oleh perjalanan masamenggenangi udara pergerakan Islam baru di Indonesia, muncul dengan beragam nama. Lebih lanjut Stoddard berkomentar bahwa Perkumpulan *Jami'at al-Khair* di Jawa dapat dikatakan sebagai penggerak pembaharuan Islam pertama di pulau yang padat penduduknya itu. Ini terjadi sekitar tahun 1905. Dari sinilah, K.H. Ahmad Dahlan (w. 1923 M.), pemimpin pertama perkumpulan *Muhammadiyah*, dan orang-orang terpelajar lainnya mengenal bacaan-bacaan kaum reformis yang didatangkan dari luar negeri dan tidak lama kemudian dia mendirikan perkumpulan tersebut tahun 1912 di Yogyakarta.

Amin Rais pernah menyatakan bahwa Muhammadiyah, sebagai sebuah gerakan sosial keagamaan, merupakan suatu fenomena modern yang paling tidak memiliki tiga ciri; *pertama*, bentuk gerakannya yang terorganisasi; *kedua*, aktivitas pendidikannya yang menacu pada model sekolah modern untuk ukuran zamannya; *ketiga*, pendekatan teknologis yang digunakan dalam mengembangkan aktivitas organisasi, terutama amal usahanya. Kendatipun Muhammadiyah lahir sebagai perwujudan dari suatu pergumulan pemikiran yang mendalam, ia bukan sekedar gerakan pemikiran *an sich*, namun berupa amal nyata di tengah-tengah masyarakat. Dataran geraknya adalah praktis, tetapi basisnya adalah pemikiran. Bahkan Peacock menilai dalam *Muslim Puritan-nya* bahwa gerakan ini merupakan pergerakan pembaharuan yang terkuat di Asia Tenggara, bahkan mungkin di dunia. Untuk pendidikan Islam di Indonesia, Muhammadiyah telah meraih prestasi yang gemilang

dalam menghembuskan angin modernisasi di bidang ini, sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam tulisan ini.

B. Muhammadiyah dalam Lintasan Sejarah

Secara etimologis, nama Muhammadiyah berasal dari kata 'Muhammad', yaitu nama Rasulullah saw., dan diberi tambahan *yā nisbah* dan *tā marbūthah*, yang berarti pengikut Nabi Muhammad saw. K.H. Ahmad Dahlan (pendiri organisasi Muhammadiyah) menegaskan bahwa 'Muhammadiyah' bukanlah nama perempuan, melainkan berarti umat Muhammad, pengikut Muhammad, Nabi Muhammad saw. utusan Allah yang penghabisan. Dalam anggaran dasar Muhammadiyah yang telah disesuaikan dengan hasil Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta (1985) dan UU No. 8 tahun 1985, disebutkan bahwa Muhammadiyah merupakan gerakan Islam dan dakwah *amr ma'rūf nahy munkar* yang berakidah Islam dan bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah.

44

Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan, pada tanggal 18 Dzulhijjah 1330 H atau 18 Desember 1912 M di Yogyakarta. Ia ini dikenal sebagai organisasi yang telah menghembuskan jiwa pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia dan bergerak di berbagai bidang kehidupan umat. Organisasi ini menurut Delian Noer, didirikan Dahlan atas saran yang diajukan oleh murid-muridnya dan beberapa orang anggota Budi Utomo, untuk mendirikan lembaga pendidikan yang bersifat permanen. Hal ini nampaknya dapat dilihat dari beberapa alasan yang dikemukakan kalangan Muhammadiyah yang menjadi faktor didirikannya organisasi tersebut oleh Dahlan, yaitu :

Pertama, Ahmad Dahlan melihat adanya inkonsistensi umat Islam dalam mengamalkan ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah, sehingga bercampur dengan takhayul dan syirik serta akhlak masyarakat runtuh. Sebagaimana diketahui, bahwa orang-orang Indonesia sudah beragama Hindu sebelum datangnya Islam. Dalam catatan sejarah, agama Hindu dibawa pertama kali masuk Indonesia oleh pedagang-

pedagang India, sehingga pengaruhnya tidak terlepas dari umat Islam. Akibatnya, amalan-amalan mereka merupakan campuran antara yang benar dan yang salah.

Kedua, lembaga-lembaga pendidikan agama yang ada pada waktu itu tidak efisien. Pesantren, yang menjadi lembaga pendidikan kalangan bawah, pada masa itu dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Pada waktu itu, pendidikan di Indonesia telah terpecah menjadi dua, yaitu pendidikan sekuler yang dikembangkan oleh Belanda dan pendidikan pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu yang hanya berhubungan dengan agama. Akibatnya, terjadi jurang pemisah yang sangat dalam antara golongan yang mendapat pendidikan sekuler dengan yang mendapatkan pendidikan di pesantren. Ini juga mengakibatkan terpecahnya rasa persaudaraan (*ukhuwwah islamiyah*) di kalangan umat Islam dan semakin melemahnya kekuatan umat Islam.

Ketiga, kemiskinan yang menimpa rakyat Indonesia, terutama umat Islam yang sebagian besar adalah petani dan buruh. Orang kaya hanya mementingkan dirinya sendiri, dan bahkan banyak ulama yang 'lupa' mengingatkan umatnya bahwa Islam mewajibkan zakat bagi si kaya, sehingga hak-hak orang miskin terabaikan. *Keempat*, aktivitas misi Katolik dan Protestan sudah giat beroperasi sejak awal abad ke-19 dan bahkan sekolah-sekolah misi mendapat subsidi dari pemerintah Hindia Belanda. *Kelima*, kebanyakan umat Islam hidup dalam alam fanatisme yang sempit, bertaklid buta, dan berpikir secara dogmatis. Kehidupan umat Islam masih diwarnai konservatisme, formalisme, dan tradisionalisme.

Melihat keadaan umat Islam yang demikian, dan didorong oleh pemahamannya terhadap Q.S. Āli 'Imrān:106, K.H. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah sebagai organisasi pembaharu Islam yang non-politik dan mengajak umat Islam untuk kembali menjalankan syari'at sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw. Dalam catatan Delian Noer, organisasi ini memiliki pada awalnya bermaksud untuk "menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad saw.

kepada penduduk bumiputera" dan "memajukan hal agama Islam kepada anggota-anggotanya".

Pada mulanya, Muhammadiyah, sesuai dengan perkembangan yang ada pada masa awal kelahirannya, melakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut :

Pertama, membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan-kebiasaan non-Islam. Hal ini dilakukan dengan mempergiat dan memperdalam penyelidikan ilmu agama Islam untuk mendapatkan kemurniannya; memperteguh iman; menggembirakan (memotivasi dan memasyarakatkan) dan memperkuat ibadah; mempertinggi akhlaq; mempergiat dan menggembirakan dakwah Islam serta *amr ma'rūf nahy munkar*; mendirikan, menggembirakan, dan memelihara tempat-tempat ibadah dan wakaf.

Kedua, mengadakan reformulasi doktrin-doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. Sifat 'kritis' inilah yang menjadi salah satu ciri khas gerakan Muhammadiyah yang cukup menonjol, yang mampu dengan sendirinya mempertanyakan ulang bagaimana pertautan antara 'teks' dengan 'realitas' atau antara 'normativitas' al-Qur'an dan al-Sunnah dengan 'historisitas' pemahaman umat Islam pada kurun tertentu terhadap teks tersebut.

Ketiga, mengadakan reformasi ajaran dan pendidikan Islam. Pembaharuan Muhammadiyah terlihat dari dua sisi ketika itu, yaitu memberikan pelajaran agama Islam di sekolah-sekolah Belanda dan mendirikan sekolah-sekolah sendiri yang berbeda dengan sistem pesantren. Di sekolah ini, di samping pendidikan agama, juga diberikan pendidikan umum; tidak dilakukan pemisahan antara murid laki-laki dengan perempuan.

Keempat, mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan-serangan dari luar. Untuk itu, Muhammadiyah berusaha membentengi para pemuda, wanita, pelajar, dan rakyat biasa dengan menimbulkan kesadaran beragama mereka, dan berusaha untuk memperbaiki kehidupan dan penghidupan mereka sesuai dengan ajaran Islam. Di samping itu, rasa persatuan dan *ukhuwwah islāmiyyah* di kalangan umat Islam perlu digalang kembali.

Keempat hal yang merupakan tujuan ini, telah menjadi aktivitas Muhammadiyah pada awal berdirinya. Tujuan ini dapat dilihat pada anggaran dasar Muhammadiyah ketika diajukan permohonan pengesahan Perserikatan Muhammadiyah pada tanggal 20 Desember 1912. Di sana terlihat bahwa maksud dan tujuan Muhammadiyah itu disusun secara sederhana dalam dua kalimat, yaitu: *pertama*, memajukan serta menggembirakan pelajaran dan pengajaran agama Islam dalam kalangan sekutu-sekutunya; *kedua*, memajukan dan menggembirakan hidup sepanjang kemauan agama Islam dalam kalangan sekutu-sekutunya.

Kedua rangkaian kalimat ini mengandung arti yang sangat dalam yang dijabarkan dalam berbagai aktivitas Muhammadiyah ketika itu. Sebagai badan hukum, Muhammadiyah baru secara resmi diakui oleh Pemerintah Belanda pada tanggal 22 Agustus 1914, dua tahun setelah Ahmad Dahlan mengajukan permohonannya yang tercantum dalam *Gouvernement Besluit* No. 81 (SK Pemerintah Hindia Belanda), tanggal 22 Agustus 1914. Namun dalam SK ini, organisasi tersebut hanya diizinkan untuk daerah Yogyakarta dan berlaku selama 29 tahun. Pengakuan ini setiap tahun terus-menerus diperbaharui, sampai keluar *Gouvernement Besluit* No. 32, tanggal 2 September 1921, yang mengizinkan Muhammadiyah memperluas gerak aktivitasnya di luar Yogyakarta. Jika masa berlaku izin telah habis, yang dibatasi selama 29 tahun, harus diajukan permohonan perpanjangan kembali. Namun sebelum masa berlaku habis, Belanda telah terusir dari Indonesia dan diambil alih oleh Jepang yang izinnya tertuang dalam SK Pemerintah Militer Jepang di Jawa-Madura pada tanggal 10 September 1943 dengan syarat: *pertama*, tidak boleh mengorganisasi kaum wanita (seperti *Fujinkai*), para pemuda (seperti *Seinendan*) dan anak-anak (seperti *Syenendam*); *kedua*, dalam Anggaran Dasar dinyatakan dan ditulis bahwa kemakmuran bersama di Asia Timur Raya berada di bawah Dai Nippon, dan hal itu harus diyakini sebagai yang diperintahkan oleh Allah swt.

Sejak dibolehkannya Muhammadiyah meluaskan jangkauannya ke luar Jawa, maka cabang-cabang Muhammadiyah pun bermunculan, dan telah menyeberang ke Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, bahkan sampai sekarang, organisasi ini telah menjangkau seluruh wilayah nusantara. Dengan berkembangnya Muhammadiyah di seluruh pelosok Nusantara waktu itu, maka pembenahan organisasi secara menyeluruh mulai dilakukan, sehingga struktur organisasi ini semakin baik. Dalam AD dan ART-nya, Perserikatan Muhammadiyah terdiri dari beberapa tingkat, yaitu :

Pertama, Ranting; kesatuan anggota di suatu tempat; dan merupakan satuan organisasi terbawah. Ranting ini dapat berdiri jika anggota Muhammadiyah di tempat tersebut telah lebih dari lima orang dan mempunyai amal usaha sebagai wadah gerakan mereka.

Kedua, Cabang; kesatuan Ranting-Ranting dalam suatu tempat. Untuk itu, satu cabang dapat didirikan jika di daerah tersebut sudah ada paling sedikit tiga Ranting, dan mempunyai amal usaha sebagai wadah gerakan dalam mencapai tujuan. Cabang ini setingkat dengan kecamatan dalam pemerintahan.

Ketiga, Daerah; kesatuan Cabang-Cabang dalam sebuah kabupaten atau kota, yang terdiri minimal tiga Cabang yang telah disahkan, dan mempunyai amal usaha sebagai wadah perjuangan dalam mencapai tujuan.

Keempat, Wilayah; kesatuan Daerah-Daerah dalam suatu propinsi atau yang setingkat, serta berkedudukan di ibu kota propinsi. Suatu Wilayah dapat didirikan jika di wilayah tersebut telah ada minimal tiga Daerah yang disahkan dan memiliki amal usaha sebagai wadah perjuangan dalam mencapai tujuan Muhammadiyah.

Pimpinan dalam Muhammadiyah juga bertingkat, mulai dari Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Ranting. Susunan pimpinan ini bersifat vertikal. Adapun secara horizontal, pimpinan Muhammadiyah dalam seluruh tingkat bisa berwujud majelis atau bagian. Untuk tingkat Daerah di atas, pimpinannya secara horizontal disebut 'majelis', di samping juga

dikenal badan-badan tertentu sesuai dengan kebutuhan. Untuk tingkat Cabang dan Ranting, pimpinan horizontal ini disebut 'badan'. Dalam melaksanakan program yang telah disusun oleh masing-masing tingkat pimpinan ini, majelis atau badan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan bekerja, sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Pimpinan dalam semua tingkat struktur Muhammadiyah, vertikal dan horizontal, adalah orang-orang yang memenuhi syarat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ART Muhammadiyah, yaitu: telah menjadi anggota paling kurang 1 tahun, setia kepada asas, tujuan dan perjuangan perserikatan, taat kepada garis kebijaksanaan pusat, mampu dan cakap menjalankan tugas, dapat menjadi teladan yang baik bagi umat, tidak merangkap pimpinan organisasi politik, dan lain sebagainya.

Adapun majelis, sebagai pembantu pimpinan perserikatan, dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan bidangnya, antara Pusat, Wilayah, dan Daerah, bisa berbeda. Artinya, ada majelis atau badan yang di tingkat Pusat diadakan, sedangkan di tingkat bawahnya tidak perlu ada. Majelis atau badan yang ada dalam Muhammadiyah sebelum Muktamarnya yang ke-41 di Surakarta (1985), terdiri atas; Majelis Tarjih, Majelis Tabligh, Majelis Pembina Kesejahteraan Umat, Majelis Pendidikan dan Pengajaran, Majelis Hikmah, Majelis Ekonomi, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, dan Majelis Pustaka. Pada perkembangan selanjutnya, ketika Muktamar Muhammadiyah ke-42 di Yogyakarta (1990), sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, majelis-majelis ini mengalami perubahan dan penyempurnaan lagi, di samping adanya badan-badan khusus lainnya yang diperlukan. Untuk tingkat Pusat saja misalnya, majelis-majelis tersebut terdiri atas; Majelis Tarjih, Majelis Tabligh, Majelis Pembina Kesejahteraan Sosial, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Majelis Pendidikan Tinggi, Majelis Kebudayaan, Majelis Pembina Kesehatan, Majelis Ekonomi, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, dan Majelis Pustaka. Di samping itu, ada lagi lembaga-lembaga lain yang setingkat majelis, seperti Badan Perencanaan dan Evaluasi, Lembaga Bimbingan dan Pengawasan

Keuangan, Badan Pembinaan Kader, Badan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri, Lembaga Hikmah dan Studi Kemasyarakatan, Lembaga Dakwah Khusus, Lembaga Pengembangan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Lembaga Pengkajian dan Pengembangan, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Selanjutnya, majelis, badan, dan lembaga untuk tingkat Wilayah, Daerah, dan Cabang, sesuai dengan SK Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 38/tahun 1991, terdiri dari; Majelis Tarjih, Majelis Tabligh, Majelis Pembina Kesejahteraan Sosial, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Majelis Kebudayaan, Majelis Pembina Kesehatan, Majelis Ekonomi, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, dan Majelis Pustaka. Majelis-majelis ini ditentukan untuk tingkat Wilayah dan Daerah, sedangkan untuk tingkat Cabang, disesuaikan dengan kondisi objektif Cabang itu sendiri. Sementara badan atau lembaga yang dapat dibentuk untuk tingkat Wilayah sesuai dengan kondisi objektif adalah Badan Perencanaan dan Evaluasi, Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan, Badan Pendidikan Kader, dan Lembaga Hikmah dan Studi Kemasyarakatan. Untuk tingkat Daerah, yang dibenarkan dibentuk sesuai dengan kebutuhan adalah Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan dan Badan Pendidikan Kader. Di samping majelis, badan, dan lembaga yang ada, pimpinan perserikatan di setiap tingkat juga mempunyai sekretariat eksekutif yang bertugas sebagai pembantu pimpinan di bidang administratif.

Jika dibandingkan bentuk-bentuk majelis sebelum dan sesudah Muktamar Muhammadiyah ke-42, terlihat bahwa struktur dan lembaga-lembaga majelis atau badan yang diperlukan mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini sesuai dengan keinginan kalangan Muhammadiyah sendiri, yakni bahwa organisasi mereka sebagai *Gerakan Tajdid* dikelola secara professional dan modern sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi Indonesia yang semakin berkembang.

Berhasilnya Muhammadiyah dalam mengembangkan pemikiran dan organisasinya ini dalam penilaian Delian tidak lain karena sikap 'toleran' dan pengabdian yang sungguh-sungguh pada

kerjanya. Dalam hal ini, reformasi dan rekonstruksi pemikiran dan pemahaman keagamaan Islam dalam Muhammadiyah selalu diakhiri dan diaktualisasikan dalam bentuk 'amal usaha' yang dapat dirasakan keberadaannya oleh umat sekitar. Untuk itu, perlu didukung oleh perangkat 'organisasi' dengan sistem pertanggungjawaban (*mas'uliyah*) yang jelas. Oleh karena itu, Amin Abdullah melukiskan pembaharuan pemikiran keagamaan Muhammadiyah sebagai *a faith in action* (iman dalam gerak perbuatan), sehingga dalam waktu yang relatif singkat, Muhammadiyah, pada tahun 1925, organisasi ini telah memiliki delapan Hollands Inlandse School (HIS), sebuah sekolah guru di Yogyakarta, 32 buah SD lima tahun, sebuah Schakel School, dan 14 buah madrasah, yang seluruhnya dengan 119 guru dan 4000 murid. Kemudian tahun 1929, organisasi ini telah mempublikasikan penerbitan sejumlah 700.000 buah buku dan brosur, dan pada tahun 1938 -menurut catatan akhir Delian- sudah memiliki 852 cabang serta 898 kelompok (yang belum berstatus cabang), seluruhnya dengan 250.000 anggota, memelihara 834 mesjid dan langgar, 31 perpustakaan umum, dan 1774 sekolah. Di samping itu, terdaftar pula propagandis Muhammadiyah sebanyak 5516 laki-laki dan 2114 wanita. Inilah sebuah prestasi gemilang yang telah mampu diraih organisasi ini sebelum masa kemerdekaan.

C. Perkembangan dan Kiprah Muhammadiyah sebagai Institusi Pendidikan Islam di Indonesia

Muhammadiyah, sesuai dengan anggaran dasarnya, berkeinginan untuk mendorong pengkajian ajaran-ajaran Islam maupun perkembangan kehidupan beragama di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, harus didirikan sekolah-sekolah yang memberikan pengajaran agama berdampingan dengan pelajaran-pelajaran sekuler. Jasa seorang figur seperti Ahmad Dahlan ini patut untuk dihargai, sebab dengan kegigihannya demi kepentingan sosial umat Islam, yang konon rela 'melelang' perabot rumah tangganya untuk pendirian sekolah Muhammadiyah, menjelang wafatnya, dia

sudah berhasil mendirikan beberapa jenis sekolah, yaitu : Opleiding School di Magelang; Kweeck School di Magelang dan Purworejo; Noormal School di Blitar; Algemeene Midelbare School di Surabaya; Sekolah Guru di Kotagede; Hoogere Kweeck School di Purworejo, dan lain-lain.

Sekolah-sekolah tersebut dimunculkan tokoh Muhammadiyah ini sebagai jawaban atas kekhawatirannya terhadap sistem pendidikan di Indonesia yang pada waktu itu terjadi dualisme, antara pendidikan Islam tradisional dan pendidikan sekuler yang kalau tidak 'dikawinkan', maka jurang pemisah akan semakin menganga lebar dan runtuhnya sendi-sendi *ukhuwwah islāmiyyah* di kalangan umat Islam akan semakin terlihat oleh musuh. Selain itu, faktor yang mendorong K.H. Ahmad Dahlan untuk melakukan pembaharuan dalam pendidikan adalah adanya ketidakselarasan antara pendidikan model Barat dengan permasalahan umat yang berkembang pada waktu itu dan prinsip dasar ajaran Islam.

52

Sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda merupakan sekolah yang bersifat sekuler dalam arti pelajaran agama atau semangat agama tidak diberikan dalam mata pelajaran. Mata pelajaran yang diberikan untuk mengisi pendidikan jiwa seperti sejarah dan ilmu bumi diberikan dengan nuansa kebarat-baratan, tidak mengakar pada kebudayaan bangsa. Akibatnya, sekolah-sekolah itu menjadi satu masyarakat tersendiri yang terlepas dari kehidupan batin bangsa Indonesia. Pendidikan ini menimbulkan semangat intelektual yang egoistis dan materialistis.

Oleh sebab itu, K. H. Ahmad Dahlan, berpendapat bahwa pendidikan agama harus dibarengi dan sejalan dengan pendidikan umum. Adapun pendidikan agama yang sebelumnya hanya menggunakan metode *sorogan* dan *weton*, dan lazim digunakan dalam pesantren tradisional, aktivitas belajarnya terkesan *jumud*, di mana ketika sang guru menerangkan pelajaran, murid hanya menyimak dan mencatat seperlunya, tidak ada diskusi, sebab secara etik, seorang murid tidak diperkenankan untuk membantah pendapat gurunya.

Kedua metode ini lebih mementingkan daya hafalan dan kemampuan membaca, meskipun tanpa pengertian, sedangkan daya berpikir tidak begitu ditonjolkan. Hal inilah yang dianggapnya sebagai sistem pendidikan yang 'pincang' yang hanya menekankan terhadap fungsi jiwa tertentu dan mengabaikan fungsi jiwa lainnya.

Dari sini, diketahui bahwa K.H. Ahmad Dahlan dalam menyelenggarakan pendidikan bagi umat memiliki kepedulian terhadap pengembangan intelektual di samping menanamkan moral. Dia menghendaki agar para siswa Muhammadiyah menjadi ulama yang maju, yaitu ulama yang memiliki ilmu modern Barat, di samping ilmu agama yang dimilikinya.

Modernisasi pendidikan di Indonesia yang telah ditelorkan oleh Muhammadiyah ini, terlihat dari dua sisi; pengajaran pelajaran agama Islam di sekolah-sekolah Belanda; pendirian sekolah-sekolah sendiri yang berbeda dengan sistem pesantren tradisional yang para siswanya dibekali tidak hanya ilmu agama, namun juga diberikan pendidikan umum di samping tidak dilakukan pemisahan antara murid laki-laki dengan perempuan.

Berkenaan dengan pandangan tentang muatan kurikulum pendidikan, yaitu dengan memberikan pelajaran agama dan pelajaran umum secara bersama-sama dimaksudkan agar lahir generasi yang memiliki kualifikasi sebagai ulama intelektual, yaitu ulama yang tidak hanya menguasai ilmu-ilmu agama, tetapi juga menguasai ilmu-ilmu umum. Kemudian dengan mengisi pelajaran agama pada sekolah-sekolah sekuler, dimaksudkan agar para intelek hasil didikan sekolah tersebut sedikit banyaknya mengerti soal-soal agama. Muhammadiyah juga dapat menerima sistem pendidikan yang dikembangkan dalam pendidikan model Barat, terutama dalam cara penyelenggaraan sekolah dengan menggunakan sistem klasikal, adanya koedukasi dalam pendidikan, struktur pendidikan dan rencana pelajaran yang diatur secara efisien.

Dalam catatan Mahmud Yunus, beberapa sekolah-sekolah Muhammadiyah yang tertua dan besar jasanya, seperti; Kweekschool

Muhammadiyah (Yogyakarta), Mu'allimin Muhammadiyah (Solo dan Jakarta), Mu'allimat Muhammadiyah (Yogyakarta), Zu'ama/Za'imat (Yogyakarta), Kulliyah Muballigin/Muballigat (Padang Panjang, Sumatera Tengah), Tablignschool (Yogyakarta), HIK Muhammadiyah (Yogyakarta). Banyak lagi HIS Muhammadiyah, Mulo, AMS Muhammadiyah, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah/Wustha Muhammadiyah dan lain-lain. Semuanya itu didirikan pada masa penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang, tersebar pada setiap cabang Muhammadiyah di seluruh kepulauan Indonesia. Ketika masa kemerdekaan, Muhammadiyah terus membangun banyak sekolah atau madrasah yang menurut siaran Muhammadiyah (edisi Oktober 1957), jumlah sekolah/madrasah adalah sebagai berikut :

Pertama, Madrasah, terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah (412 buah), Madrasah Tsanawiyah (40 buah), Madrasah Diniyah (82 buah), Madrasah Mu'allimin (73 buah), dan Madrasah Pendidikan Guru Agama (75 buah).

54 *Kedua*, Sekolah, terdiri dari Sekolah Rakyat (445 buah), SMP (230 buah), SMA (30 buah), TK (66 buah), SGB (69 buah), SGA (16 buah), Sekolah Kepandaian Putri (9 buah), Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (3 buah), Sekolah Guru TK (2 buah), SMEA (1 buah), Sekolah Guru Kepandaian Putri (1 buah), Sekolah Guru Kepandaian Jasmani (1 buah), Sekolah Pendidikan Kemasyarakatan (1 buah), Sekolah Putri Aisyiah (1 buah), Fakultas Hukum dan Filsafat (1 buah), dan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (1 buah).

Selain itu, untuk menunjang program-program pendidikan yang dicanangkan oleh organisasi Muhammadiyah ini, adalah dengan adanya beberapa organisasi-organisasi otonom yang gerak dan tujuannya sejalan dengan Muhammadiyah, di antaranya adalah :

Pertama, *Aisyiyah*, bergerak dan berjuang di tengah-tengah kaum ibu atau muslimat Indonesia yang didirikan K.H. Ahmad Dahlan pada bulan April 1917, karena didorong oleh kesadaran bahwa kaum wanita sejajar dengan pria dalam berbakti kepada Allah swt. Oleh sebab itu, Muhammadiyah harus menyiapkan wahana untuk membina

kaum muslimat, sehingga mereka dapat ikut serta bersama kaum pria menjunjung tinggi agama Islam dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah.

Kedua, Nasyi'atul Aisyiyah, suatu perkumpulan para putri Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang pembinaan remaja putri Islam, berdiri sejak tahun 1930 yang pada awalnya bernama Siswa Praja Wanita yang didirikan oleh Siti Washilah Hadjid. Ketika itu, Siswa Praja Wanita masih belum menjadi bagian dari Aisyiah dan hanya merupakan perkumpulan remaja putri Kauman Yogyakarta. Bersama dengan berdirinya organisasi ini, berdiri juga Siswa Praja Pria. Kedua perkumpulan ini seringkali mengadakan rapat bersama dalam rangka mengembangkan gerakan mereka. Setelal lima tahun berdiri Siswa Praja Wanita yang dipimpin oleh Siti Umayah yang ketika itu sudah maju pesat dan berdiri sendiri tanpa bantuan Siswa Praja Pria. Pada tahun 1929, Siswa Praja Wanita ini menjadi bagian dari Aisyiah yang dipimpin oleh Siti Zuchriyah dan mengalami perkembangan pesat dengan banyaknya cabang dan ranting di luar Yogyakarta. Setelah itu, tahun 1930, nama Siswa Praja Wanita diganti dengan Nasyi'atul Aisyiah.

Ketiga, Pemuda Muhammadiyah, dimaksudkan untuk membina dan menggerakkan potensi para pemuda Islam yang didirikan pada tanggal 2 Mei 1932 berdasar hasil keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-21 di Ujung Pandang dan juga dijiwai oleh ayat al-Qur'an dalam Q.S. al-Kahf:13 yang artinya: "*Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan Kami tambahi mereka dengan petunjuk*".

Keempat, Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), bertugas untuk membina dan menggerakkan potensi para pelajar Islam yang secara resmi didirikan ketika berlangsungnya Konferensi Daerah Pemuda Muhammadiyah se-Indonesia tanggal 16 Juli 1961.

Kelima, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), bertugas membina dan menggerakkan potensi para mahasiswa Islam yang secara khusus bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan kemahasiswaan. Organisasi ini didirikan pada tanggal 14 Maret 1964.

Keenam, Tapak Suci, disebut juga Persatuan Pencak Silat Putra Muhammadiyah, didirikan di Kauman, Yogyakarta, pada tanggal 31 Juli 1963 yang terdiri dari tiga tingkat keanggotaan; tingkat anak-anak (12-16 tahun), dengan tanda 'teratai putih'; tingkat dewasa (17 tahun ke atas), dengan tanda 'teratai cokelat'; tingkat pelatih, dengan tanda 'teratai merah'.

Ketujuh, Hizbul Wathan atau Kepanduan Muhammadiyah yang didirikan Dahlan pada tahun 1918 yang dipelopori oleh Siradj Dahlan dan Sarbaini. Atas usul R.H. Hadjid, Kepanduan Muhammadiyah dirubah menjadi *Hizbul Wathan* yang memiliki tiga tingkatan; tingkatan Athfal (8-11 tahun); tingkatan Pengenal (12-16 tahun); tingkatan Penghela (17 tahun ke atas). Dengan SK Presiden RI No. 268 / 1961, HW ditiadakan dan disatukan dalam Gerakan Pramuka (Praja Muda Karana).

Seluruh organisasi otonom Muhammadiyah tersebut di atas mempunyai tujuan dan maksud yang sama dengan tujuan Muhammadiyah. Struktur organisasinya juga bertingkat-tingkat, mulai dari Ranting, Cabang, Daerah, Wilayah, sampai ke Pusat; memiliki anggaran dasar dan rumah tangga serta program sendiri.

Perangkat organisasi Muhammadiyah, amal usaha, dan perjuangan yang dilakukannya telah memberikan andil yang begitu besar dalam mencapai dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Dari segi pendidikan ini misalnya, Muhammadiyah, melalui sekolah-sekolahnya telah banyak melahirkan para pemimpin bangsa dan pemimpin masyarakat. Dari segi dakwahnya, Muhammadiyah telah berusaha dan banyak menghasilkan pemberantasan terhadap ajaran-ajaran yang datang dari luar Islam. Dari segi santunan sosial, Muhammadiyah juga telah ikut aktif menangani permasalahan yatim piatu dan kesehatan masyarakat melalui panti-panti asuhan dan rumah-rumah sakit serta klinik yang mereka miliki.

Selain itu, Muhammadiyah juga aktif di bidang penerbitan, seperti penerbitan edisi al-Qur'an, satu dalam bahasa Melayu dan dua dalam bahasa Jawa, yang satu dengan aksara Jawa, dan yang

lainnya dengan huruf Latin. Organisasi ini juga ikut serta aktif dalam memberikan saran dan pendapatnya terhadap suatu UU yang akan ditetapkan oleh pemerintah melalui DPR/MPR, yang dimulai dari keikutsertaannya dalam merumuskan Dasar Negara dan UUD RI 1945, UU Perkawinan, UU Pendidikan, dan RUU Peradilan Agama. Dari sini, nampaknya cita-cita K.H. Ahmad Dahlan untuk menggairahkan dan menggembarakan pelaksanaan ajaran Islam sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah melalui organisasi Muhammadiyahnya agaknya mulai terlihat setahap-demi setahap di berbagai pelosok wilayah Indonesia.

D. Filosofi dan Mekanisme Kerja Muhammadiyah dalam Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia

Sebagaimana yang dipaparkan, sebelumnya, bahwa Muhammadiyah semenjak kelahirannya sebagai sebuah pemikiran dan organisasi telah begitu banyak memberikan kontribusi yang signifikan dalam melancarkan arus modernisasi di segala aspek kehidupan, terutama pendidikan Islam di Indonesia ini.

Muhammadiyah, sebagai organisasi sosial keagamaan, sejak awal berdirinya sebenarnya didorong oleh 'kegelisahan' dan 'keprihatinan' yang mendalam terhadap model dakwah dan pola pemikiran keagamaan Islam konvensional-tradisional yang biasa berlaku saat itu. Muhammadiyah tidak puas dengan pernyataan dan pujian al-Qur'an yang jelas-jelas menyebutkan '*kuntum khayra ummah*', tetapi dalam realitas historisnya hampir seluruh umat Islam di dunia waktu itu hidup dalam cengkeraman kolonialisme. Selain itu, ia juga tidak puas dan sekaligus protes ketika melihat kenyataan historis bahwa ayat-ayat kemanusiaan (*al-insāniyyah*) dalam al-Qur'an yang sering dikutip dan didakwahkan secara lisan ditelantarkan begitu saja dalam wilayah praktik hidup keseharian masyarakat muslim waktu itu.

Ayat-ayat al-Qur'an tentang kemanusiaan yang sempat dicermati dan dikritisi oleh generasi awal Muhammadiyah, diungkapkan oleh Amin Abdullah, baru sampai pada ayat-ayat yang terkait dengan pendidikan (seperti Q.S. al-'Alaq/96:1-5), kesehatan (seperti Q.S.

al-Syu'arā/26:80), dan ayat-ayat yang bersentuhan dengan nasib yatim piatu (seperti Q.S. al-Mā'ūn/107:1-7). Dari sini nampak bahwa pembaharuan pemikiran keagamaan Islam Muhammadiyah sangat menggarisbawahi corak pemikiran keagamaan Islam yang bersifat praktis -bukan semata-mata teoritis-, dalam memahami dan menginterpretasikan ayat-ayat al-Qur'an.

Kecermatan dan titik tekan pada sisi praktis tersebut, oleh Muhammadiyah dibarengi pula dengan kesadaran akan perlunya kelembagaan/organisasi yang kuat. Ketika K. H. Ahmad Dahlan membaca dan memahami ayat-ayat al-Qur'an yang menganjurkan untuk mencari ilmu, dia sekaligus membandingkannya dengan praktik historisitas kelembagaan model pesantren-pesantren saat itu. Secara ijtihadi, Muhammadiyah melihat adanya *something lack* -untuk tidak menyebutnya sebagai *something wrong*-di lingkungan kelembagaan dan keilmuan pesantren saat itu. *Output* lembaga pendidikan dan keilmuan pesantren saat itu kelihatan tidak berdaya dan lumpuh jika dibandingkan dengan tuntutan perubahan zaman. Masalah ini lebih-lebih jika dibandingkan dengan sistem kelembagaan sekolah-sekolah yang dimotori oleh pemerintahan kolonial Hindia-Belanda yang dikelola oleh misi Kristen Katolik saat itu.

58

Khususnya dalam upaya mendidik dan menyiapkan sumber daya manusia yang handal di berbagai bidang, Muhammadiyah berupaya mengubah kelembagaan pendidikan dan keilmuan model pesantren *in the old sense* menjadi kelembagaan pendidikan dan keilmuan model sekolah 'umum' dan 'agama' yang digabungkan dalam satu atap. Sebuah eksperimen sejarah yang relatif 'berani' untuk ukuran saat itu karena dengan demikian, Muhammadiyah seolah-olah melanggar dan menerjang pagar rambu-rambu yang selalu ditiup-tiupkan saat itu, yaitu *man tasybbaha biqawmin fahuwa minhum* (barang siapa yang menyerupai suatu kaum -pakaianya, cara berpikarnya, institusinya, dan lain sebagainya-, sesungguhnya ia adalah bagian dari mereka). Tergambar sikap keterbukaan dan inklusivitas memang merupakan salah satu prasyarat untuk melakukan *tajdid* atau *ijtihad*.

Dengan cara berpikir seperti itu, Muhammadiyah selalu mengambil inisiatif untuk langsung memasuki wilayah pergumulan kehidupan sosial-kemasyarakatan dan kebudayaan konkrit yang dihadapi oleh umat Islam. Inilah yang disebut-sebut Amin Abdullah sebagai "dakwah kebudayaan" yang menekankan perlunya pergulatan, pergumulan, dan persentuhan langsung dengan realitas dan persoalan serta kebutuhan konkrit komunitas muslim dalam arti yang seluas-luasnya. Corak berpikir keagamaan model ini bersifat historis-praktis, *open ended*, tidak kenal ujung final, sekaligus memerlukan dedikasi yang prima.

Mencermati mekanisme kerja modernisme model Muhammadiyah, dalam catatan Amin Abdullah, setidaknya ada empat ciri yang melekat pada jati diri Muhammadiyah tersebut dalam menjalankan misinya saat itu :

Pertama, modernisme model Muhammadiyah senantiasa menyatukan dimensi ajaran "kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah" dengan dimensi *ijtihād* dan *tajdīd* sosial keagamaan. Ciri khasnya adalah dengan adanya hubungan yang bersifat dialektis-hermeneutis (hubungan timbal-balik dan bolak-balik), bukan hubungan yang bersifat dikotomis-eksklusif antara sisi normativitas al-Qur'an (dengan simbolisasi "kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah") dan historisitas pemahaman umat Islam pada wilayah kesejarahan tertentu (dengan simbolisasi *ijtihād* dan *tajdīd*).

Kedua, dalam mengaktualisasikan cita-cita perjuangannya, modernisasi model Muhammadiyah ini menggunakan sistem organisasi untuk tidak menyebutnya hanya sebagai prakarsa pribadi. Dengan menggunakan sistem 'organisasi', ada semacam proses abstraksi dan transendensi dalam cara berpikir sosial-keagamaan Muhammadiyah. Melalui model bekerja secara organisatoris, Muhammadiyah ingin mengangkat kepentingan dan keselamatan sosial. Ini merupakan kreativitas yang cukup orisinal dari Muhammadiyah, sehingga membawa perubahan yang cukup radikal untuk ukuran saat itu. Dalam sistem organisasi, dituntut pertanggungjawaban pengurus

secara kolektif dan terbuka di muka para anggota pada setiap akhir masa bakti kepengurusan, menyangkut program kerja, keuangan, dan kegiatan organisasi secara keseluruhan.

Ketiga, modernisasi model Muhammadiyah ini bercorak "antikemapanan". Melalui pintu *ijtihad* dan *tajdid*, sebenarnya Muhammadiyah secara embrional telah memberi bekal yang cukup berharga untuk memasuki arena -yang disebut oleh arus pemikir sekarang- dengan 'diskursus postmodernisme' (pemikiran modern tahap lanjut). Dari semula, Muhammadiyah sangat kritis terhadap praktik-praktik kelembagaan keagamaan Islam yang hanya meniru warisan literatur atau teks-teks keagamaan Islam abad pertengahan yang tanpa disertai sikap kritis dan tanpa berusaha untuk mengkonfirmasi kembali dengan semangat dan nilai fundamental al-Qur'an dan al-Sunnah serta semangat zaman yang berubah.

Keempat, Muhammadiyah bersikap responsif dan adaptif terhadap tuntutan perubahan zaman. Dengan cara berpikir dan model strategi kebudayaan yang langsung dihadapkan dan dipadukan dengan semangat *ijtihad* dan *tajdid*, strategi kebudayaan Muhammadiyah menjadi lincah dalam mempertahankan aspirasi dan prinsip-prinsip dasar perjuangannya dalam berbagai era perubahan sosial di Indonesia. Fleksibilitas (kelenturan) dan kekenyalan model religiusitas kebudayaan yang dipilih Muhammadiyah, serta kedekatan dan kebersamaannya dengan denyut nadi perubahan sosial yang hidup dalam masyarakat lapis atas dan lapis bawah, merupakan salah satu kunci kekuatannya.

Keempat ciri tersebut sangat nampak pada modernisasi yang dilakukannya dalam sektor pendidikan. Pemberian pelajaran agama sebagai tambahan pelajaran dalam sistem pendidikan sekuler dan pendirian sekolah yang didalamnya disatukan pendidikan agama dan umum merupakan satu langkah yang sangat konstruktif dan radikal pada saat itu. Ketika terjadi ketimpangan sistem pendidikan keadaan umat Islam yang akan semakin mengalami kemunduran karena sistem pendidikan Barat yang sekuler dapat membawa kepada

kerusakan moral. Sedangkan sistem pendidikan pesantren hanya mampu melayani kebutuhan masyarakat agraris, maka lembaga pendidikan Muhammadiyah tampil dengan 'wajah baru' yang sama sekali belum pernah muncul saat itu untuk berusaha menjangkau kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang dan modern. Oleh karena itu, dalam pernyataan M. Basyit Wahid yang dikutip oleh Muhaimin, sulit dibayangkan munculnya golongan muslim terpelajar yang siap menghadapi kehidupan modern tanpa adanya sekolah-sekolah Muhammadiyah. Pembaharuan sosial melalui pendidikan oleh Muhammadiyah dalam konteks ini tampak menonjol.

Kendatipun secara ideal Muhammadiyah menghendaki adanya keseimbangan antara pendidikan agama dan pendidikan umum yang terangkum dalam kurikulum pendidikan, namun dalam pelaksanaannya, sekolah-sekolah Muhammadiyah pada saat ini, dalam catatan Basyit-, lebih cenderung mengikuti kurikulum pendidikan yang disediakan oleh pemerintah, sehingga kadar pendidikan agama yang diterima para siswa, mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi, masih kurang memadai untuk mencapai target yang dicita-citakan. Dari sini, dapat diketahui bahwa pencapaian target yang diinginkan Muhammadiyah dalam rangka modernisasi pendidikan Islam sebenarnya harus lebih dioptimalkan lagi.

Meskipun demikian, secara tentatif, Muhammadiyah telah memainkan peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebab dilihat dari segi kelembagaannya, Muhammadiyah memiliki lembaga pendidikan yang cukup banyak. Ini berarti, secara kuantitatif, Muhammadiyah telah berhasil menjadi mitra pemerintah dalam pelaksanaan program pemerataan pendidikan. Hanya saja, yang perlu ditekankan disini adalah bahwa pendidikan tersebut -sebagaimana yang diungkapkan Malik Fadjar-, tidak hanya sebagai konsumsi yang dianggap sebagai produksi massa dengan kualitas harga yang ditekan serendah mungkin. Akibatnya, pendidikan menjadi semacam komoditi dengan kualitas rendah dan proses pendidikan akan terkesan formalistik, tidak ada nuansa pengembangan keilmuan. Namun

pendidikan harus dipandang sebagai investasi yang ingin memproduksi manusia dalam arti yang seluas-luasnya dan bukan hanya ingin memproduksi 'selembar ijazah'.

E. Penutup

Dari beberapa uraian sebelumnya, dapat diketahui bahwa gerakan pembaharuan Islam Muhammadiyah, baik sebagai pemikiran maupun organisasi, telah menunjukkan keberhasilannya menjalankan visi dan misi dalam mewarnai aspek-aspek kehidupan umat Islam Indonesia dengan modernisasi, meskipun target modernisasi yang ingin dicapai, terutama aspek pendidikan, nampaknya perlu untuk lebih dioptimalkan lagi. Namun demikian, Muhammadiyah memiliki sikap positif terhadap perubahan yang ada disekitarnya, sekalipun dalam tingkat responsivitas yang berbeda dalam setiap kasusnya. Hal ini tercermin pada langkah-langkahnya yang selalu bersikap adaptif dan akomodatif terhadap persoalan-persoalan yang ada, baik itu sektor politik, ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan pendidikan.

62

Pendayagunaan SDM yang bermutu dalam pengembangan pendidikan akan mengakibatkan perbaikan sosial, hal ini yang menjadi tujuan Muhammadiyah dalam penyerataan pendidikan di setiap ajarannya, dibarengi pelajaran agama sebagai filter terhadap pengaruh globalisasi dan westernisasi, maka dalam persoalan ini, Muhammadiyah terus memacu sistem yang sesuai dengan arus zaman yang berkembang, dilihat dari perkembangan organisasi tersebut, baik dalam tubuh Muhammadiyah itu sendiri, seperti banyaknya organisasi binaan Muhammadiyah, maupun dari luar tubuh organisasi, seperti banyaknya lembaga pendidikan, dari Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi yang menggunakan sistem pengajaran Muhammadiyah.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin, *Dinamika Islam Kultural Pemetaan atas Wacana Keislaman Kontemporer*, Bandung: Mizan, 2000.
- , "Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Keislaman" dalam Muhammad Azhar dan Hamim Ilyas (ed.), *Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah; Purifikasi dan Dinamisasi*, Yogyakarta: LPPI UMY, 2000.
- Anshari, A. Hafizh, (ed.), "Muhammadiyah", *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Asrohah, Hanun, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Azhar, Muhammad, dan Hamim Ilyas (ed.), *Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah: Purifikasi dan Dinamisasi*, Yogyakarta: LPPI UMY, 2000.
- Djamal, Murni, Dr. H. Abdul Karim Amrullah, *Pengaruhnya dalam Gerakan Pembaharuan Islam di Minangkabau pada Awal Abad ke-20*, Jakarta: INIS, 2002.
- Fadjar, A. Malik, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Fajar Dunia, 1999.
- Lubis, Arbiyah, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad 'Abduh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Muhaimin, *Pembaharuan Islam, Refleksi Pemikiran Rasyid Ridha dan Tokoh-Tokoh Muhammadiyah*, Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2000.
- Mulkhan, AbdulMunir, *Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Noer, Delian, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1996.
- Rais, M. Amien, (ed.), *Intelektualisme Muhammadiyah Menyongsong Era Baru*, Bandung: Mizan, 1995.
- Sarjono, et. al., *Pembaharuan Pendidikan dan Pengajaran Islam*, Yogyakarta: PP. Muhammadiyah Majelis Pengajaran, t.th.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1997.

- Stoddard, Lothrop, *The New World of Islam*, diterjemahkan oleh M. Muljadi Djojomartono (*et. al.*) dengan judul *Dunia Baru Islam*. Jakarta: t. p., 1966.
- Tim Penyusun Ensiklopedi Muhammadiyah, *Ensiklopedi Muhammadiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada dan Majelis Dikdasmen, 2005.
- Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Mutiara, 1979.
- Zuhairini, *et. al.*, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.